

# **Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pengusahaan Rotan Di Indonesia**

---

September 1999

Environmental Policy and Institutional Strengthening IQC  
OUT-PCE-I-806-96-00002-00

**Discussion Paper**

**Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya  
terhadap Pengusahaan Rotan  
di Indonesia**

September 1999

oleh:  
Erwinsyah  
Sustainable Forestry Management Specialist

The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management team works with BAPPENAS and the Directorate-General for Nature Protection and Conservation (PKA) of the Department of Forestry and Estate Crops to strengthen protected areas management in Indonesia. Work includes promoting partnerships among the private sector, government agencies, NGOs, and local communities; raising conservation awareness; improving conservation financing; and building institutional and human resources capacity.

For further information, please contact:  
Erwinsyah, Sustainable Forestry Management Specialist  
The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management Office  
tel: (62-21) 720-9596; fax: (62-21) 720-4546; email: [secretariat@nrm.or.id](mailto:secretariat@nrm.or.id)

# Daftar Isi

Abstrak .....	ii
1. Pendahuluan .....	1
2. Sumber Daya Rotan di Indonesia .....	4
3. Pemanfaatan Rotan .....	6
3.1 Kemampuan Produksi .....	6
3.2. Penerimaan dari Rotan .....	8
4. Peran Pemerintah dalam Pengusahaan Rotan .....	11
5. Kebijakan Pemerintah mengenai Tataniaga Rotan .....	13
6. Penutup .....	15
Pustaka .....	17

## **Abstrak**

Bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, rotan sudah sejak lama dikenal. Selain untuk pemakaian sendiri, rotan juga sudah lama diperdagangkan walaupun masih belum jauh berkembang dari perdagangan bahan mentah dan setengah jadi yang kemudian berkembang menjadi perdagangan hasil rotan jadi yang dilakukan oleh pedagang besar di Pulau Jawa. Akhir-akhir ini banyak dibahas beberapa masalah menyangkut tataniaga rotan baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, pengusaha daerah, pengusaha nasional dan oleh pemerintah yang hasilnya masih belum memenuhi harapan, terutama bagi pelaku bisnis baik di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat lokal. Tulisan ini juga memaparkan kontribusi rotan untuk penerimaan negara serta berbagai masalah yang dihadapi oleh para petani, petani pengumpul, pedagang di daerah serta kalangan industri pengolahan rotan di Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengelolaan sumber daya rotan berada di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sedangkan untuk pembinaan, pemanfaatan dan pengaturan distribusinya diatur oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan pemaparan dari berbagai masalah, terungkap bahwa terdapat ketimpangan keberadaan industri pengelolaan rotan. Pulau Jawa dengan berbagai prasarana dan sumber daya manusianya lebih maju dibandingkan dengan di luar Jawa. Ini menjadi sangat menarik sebagai bahan diskusi untuk penerapan Undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah yang tertuang dalam UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 dan kaitannya dengan kelanjutan perusahaan hutan di daerah. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberi dampak yang luas kepada kemampuan perusahaan rotan di daerah.

# 1. Pendahuluan

Bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, produk rotan sudah banyak dikenal terutama pada masyarakat bawah dan menengah. Selain kegiatan pengolahan rotan, maka perdagangan rotan juga telah banyak dilakukan. Terjalannya hubungan dagang dengan pihak luar negeri memacu kepada bertambahnya peran hasil rotan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara yang layak untuk diperhitungkan. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan diproklamkan, ternyata rotan telah banyak dimanfaatkan dan dikenal luas serta diperdagangkan terutama oleh masyarakat Dayak Kalimantan Timur kepada pedagang-pedagang dari China<sup>2)</sup>.

Sebagai komoditi yang mulai dapat diandalkan untuk penerimaan negara, rotan telah dipandang sebagai komoditi perdagangan hasil hutan non-kayu yang cukup penting bagi Indonesia. Produk rotan ini juga telah menambah penerimaan ekspor unggulan selain minyak dan gas bumi, serta dapat disejajarkan dengan penerimaan ekspor utama pertanian lainnya seperti kopi, karet dan minyak sawit<sup>11)</sup>.

Namun didalam pengolahan, ternyata masih belum cukup memperlihatkan daya saing yang tinggi. Desain yang dimiliki masih belum begitu berkembang dari bentuk furniture, keranjang, alat olah raga dan beberapa bentuk produk lainnya<sup>9)</sup>. Hal ini diduga karena pemerintah dan instansi lain terkait di daerah masih belum menunjukkan perhatian yang serius sebagaimana perhatian yang selama ini telah diberikan kepada produk hasil hutan lainnya terutama kayu. Sebagaimana diketahui kayu masih dipakai sebagai barometer keberhasilan ekspor hasil hutan Indonesia.

Rotan sebagaimana asalnya merupakan tumbuhan yang tergolong dalam kelompok palem-paleman yang hidupnya merambat. Golongan ini termasuk dalam sub-famili calamoideae yang mempunyai 13 marga dan sekitar 600 jenis dan hidup pada kawasan hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kelompok rotan pada umumnya tumbuh dan dijumpai pada daerah yang beriklim basah. Di Indonesia, jenis ini dapat ditemui di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kepulauan lainnya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa di Jawa dapat dijumpai sekitar 25 jenis, Sumatera 75 jenis, Kalimantan 100 jenis, Sulawesi mencapai 25 jenis. Selain itu rotan juga dapat dijumpai di beberapa pulau lainnya di Indonesia<sup>1)</sup>. Dari lebih 50 jenis yang sudah dimanfaatkan dan diperdagangkan di Indonesia, ternyata baru sebagian kecil yang diekspor; antara lain rotan manau, rotan tohiti, rotan irit, rotan sega, rotan semambu, rotan pulut putih, rotan pulut merah yang kesemuanya ini termasuk dalam kelompok calamus.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan termasuk rotan sampai sekarang masih mengacu kepada ketentuan pengelolaan kehutanan yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967. Kebijakan pemanfaatan itu belum mengantarkan kepada perhatian yang khusus sebagaimana perhatian kepada kayu. Rotan masih ditempatkan sebagai produk hutan sampingan sebagaimana dikenal dengan istilah "*minor forest product*".

Pengolahan rotan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia pada umumnya masih sangat sederhana. Kurangnya pemahaman mengenai kebiasaan masyarakat dalam membudidayakan rotan, ditambah oleh belum cukupnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di daerah terutama untuk kegiatan pengumpulan rotan dan pengolahannya menyebabkan kebijakan pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan di lapangan. Pengalaman didalam pengelolaan rotan secara tradisional oleh masyarakat keturunan Dayak yang menyebar di daerah Pasir dan Kutai khususnya di beberapa kecamatan seperti Damai, Bentian, Barong Tongkok, Melak, Tanjung Isuy dan di beberapa tempat lainnya menunjukkan bahwa budidaya rotan ini sebenarnya telah cukup berhasil<sup>2)</sup>.

Pemanfaatan hasil rotan alam dan rotan tanaman cukup berpeluang untuk meningkatkan penerimaan ekspor. Beberapa perubahan kebijakan pemerintah yang dilakukan akhir-akhir ini telah memberikan harapan bagi peningkatan penerimaan ekspor rotan Indonesia, sebagaimana dilaporkan bahwa ternyata hasilnya telah menempatkan Indonesia menjadi ekportir produk rotan yang cukup berhasil pada tahun 1991. Namun demikian walaupun telah terjadi peningkatan penerimaan ekspor namun di sisi lain masalah yang dihadapi oleh para petani, pengrajin, industri pengolah rotan dan pedagang rotan di lapangan, menjadikan memanfaatkan rotan masih sangat rendah dan bahkan sering tidak menarik lagi bagi para petani.

Untuk itu selanjutnya pemerintah mencoba mencari pemecahannya antara lain dengan ditetapkannya beberapa kebijakan melalui beberapa perangkat hukum seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri perdagangan dan berbagai peraturan lainnya. Ketentuan tataniaga ekspor rotan sebagai tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 187/MPP/Kep/4/1998 sebagai awal dari penerapan reformasi ekonomi nasional menjadi harapan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang ada.

Namun demikian, dari berbagai forum diskusi rotan terungkap adanya banyak hal yang belum terakomodasi oleh kebijakan pemerintah, karena masih belum menyentuh permasalahan yang ada di lapangan baik menyangkut masalah sumber daya, petani/pengumpul rotan, pedagang, pengolah dan tataniaga rotan itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya daya saing yang dimiliki oleh semua tingkatan membuat permasalahan yang dihadapi semakin panjang.

Untuk menjawab permasalahan industri pemanfaatan rotan tersebut, selanjutnya tulisan ini akan lebih diarahkan untuk mengkaji permasalahan yang menyangkut:

1. Peranan pemerintah dalam penetapan kebijakan terhadap pengelolaan industri rotan.
2. Identifikasi permasalahan rotan di tingkat petani, pengumpul, pedagang, dan industri dari beberapa kasus dari beberapa daerah dan sentra-sentra industri rotan.
3. Peranan daerah dalam menyediakan sumber daya rotan untuk kebutuhan industri

4. Peranan industri pengolahan rotan di Indonesia
5. Langkah yang diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan rotan di Indonesia

Metoda yang digunakan untuk menyelesaikan tulisan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui studi literatur, diskusi dan tanya jawab baik itu dengan petani, pengumpul, pedagang, industri rotan dan eksportir serta dengan pihak pemerintah.



## 2. Sumber Daya Rotan di Indonesia

Keberadaan sumber daya rotan yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu peluang dan tantangan bagi daerah setempat untuk memanfaatkannya menjadi komoditi yang dapat diandalkan terutama untuk pembangunan daerah dan untuk modal kesejahteraan masyarakat dan modal bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari beberapa tempat penghasil rotan yang tersebar di Indonesia, terutama di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Irian jaya diketahui bahwa kemampuan produksi rotan adalah berkisar antara 250.000 ton sampai dengan 600.000 ton pertahunnya. Bahkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur rotan tanaman merupakan penghasil yang sangat penting<sup>1)</sup>. Pernah dilaporkan bahwa seluas 30% hutan di Kalimantan Timur merupakan daerah yang ditumbuhi rotan.

Di beberapa tempat seperti di Kalimantan Timur, rotan tanaman adalah sumber daya yang cukup diandalkan. Rotan tanaman ini umumnya terdiri dari jenis rotan berdiameter kecil seperti rotan sega dan rotan irit yang banyak dibudidayakan oleh petani. Sedangkan rotan yang mempunyai diameter lebih dari 18 cm seperti rotan manau, rotan batang atau rotan semambu<sup>10)</sup> umumnya adalah jenis rotan yang tumbuh liar di pedalaman pada banyak hutan alam di Indonesia.

Khususnya untuk rotan yang berasal dari alam, para petani sejak lama secara tradisional dan turun temurun telah melakukan kegiatan pengumpulan. Pengumpulan rotan dari hutan alam sangat bergantung kepada kondisi pohon besar sebagai inang dimana rotan ini hidup secara merambat. Keberadaan rotan di hutan alam akan sangat bergantung kepada kualitas tegakan hutan. Kualitas hutan yang semakin menurun akibat terjadinya kerusakan dikhawatirkan akan mempersempit ruang rotan alam.

Keberadaan industri pengolahan rotan akan sangat tergantung kepada kondisi pasar. Apabila kondisi pasar mendukung, maka perlu terus didukung oleh kelancaran bahan baku. Keberadaan rotan alam pada saat ini adalah sangat mengkhawatirkan apabila mempertimbangkan kualitas hutan yang menurun ditambah lagi dengan tekanan yang cukup serius akibat semakin meningkatnya kebutuhan bahan baku rotan itu untuk pemenuhan kapasitas terpasang industri. Menurut data yang pernah disajikan Departemen Kehutanan<sup>12)</sup>, sumber daya rotan alam sebenarnya masih dapat dihasilkan dari areal hutan yang mencapai sekitar 13 juta ha.

Untuk rotan tanaman, diketahui bahwa penanaman rotan pertama yang paling berhasil adalah penanaman rotan yang dilakukan di sekitar wilayah Barito, Kapuas dan Kaharian di Kalimantan pada tahun 1850. Sejak saat itu penanaman rotan terus meningkat pesat yang meliputi areal seluas 15,000 Ha di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan jenis *Calamus trachycoleus*<sup>11)</sup> atau lebih dikenal dengan rotan irit. Rotan irit biasanya dapat dipanen pada umur antara 7 – 8 tahun dengan rotasi antara 3 tahun sampai dengan 25 atau 30 tahun. Budidaya rotan yang tadinya hanya diperuntukkan untuk kepentingan lokal kemudian berkembang dan menjadi komoditi perdagangan ke luar pulau dan bahkan telah memberikan nilai yang cukup berarti untuk kontribusi perdagangan Indonesia yang mencapai sekitar

10%<sup>13)</sup>. Tanaman rotan yang cukup luas salah satunya berada di Kalimantan Timur yang didominasi oleh tanaman yang sudah cukup tua yang meliputi luasan yang cukup besar yang diperkirakan mencapai antara 40-50% dari volume rotan yang dihasilkan propinsi tersebut. Selain di Kalimantan Timur, di Jawa juga dapat dijumpai rotan tanaman seperti yang ditanam oleh perusahaan BUMN Kehutanan Perum Perhutani. Perum Perhutani telah mengembangkan hutan tanaman yang mencapai seluas 22,000 Ha yaitu dari jenis manau di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor serta sebagian kecil di Jawa Tengah yaitu di Jember.

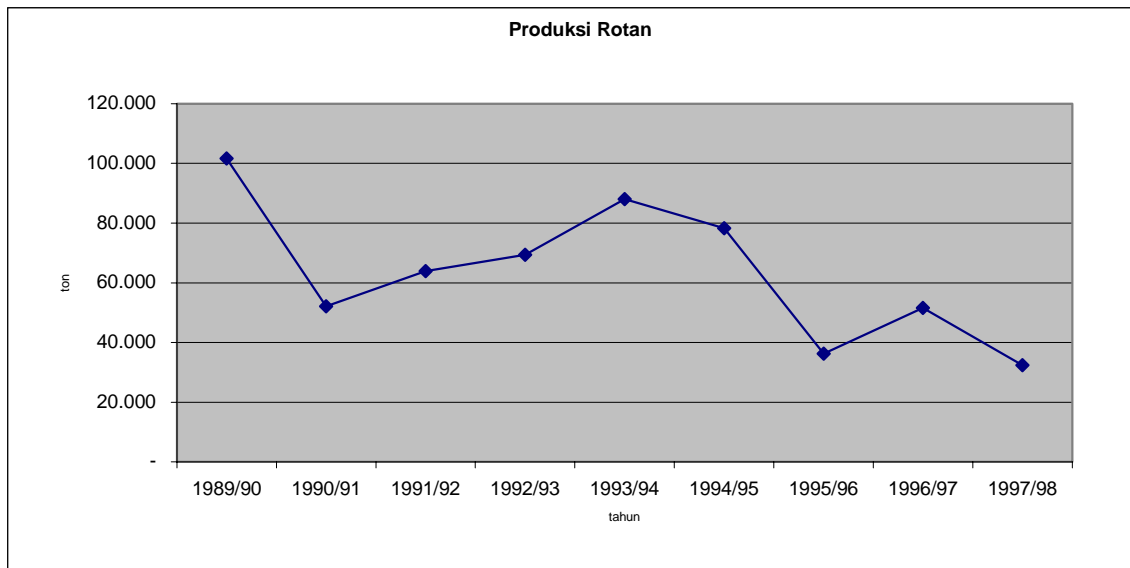
Sejalan dengan semakin berkembangnya industri dan bisnis pemanfaatan rotan melalui berbagai pengolahan untuk berbagai tujuan pemasaran, maka keberadaan sumber daya rotan dapat dipakai untuk membantu memetakan peluang perkembangan industri pengolahannya berikut tantangan pemasarannya.

### 3. Pemanfaatan Rotan

#### 3.1 Kemampuan Produksi

Menyelusuri perkembangan produksi rotan di Indonesia, pada tahun 1989an, produksi rotan di Indonesia pernah mencapai nilai yang cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 80.000 ton pertahunnya. Produksi yang tinggi pada waktu itu diduga akibat adanya lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Dan ini akibat dari usaha untuk mengejar target ekspor sehubungan dengan akan diberlakukannya larangan ekspor rotan setengah jadi pada tahun 1988. Dimana dapat dilihat bahwa setelah target ekspor terpenuhi, dan setelah pemberlakuan larangan ekspor rotan setengah jadi maka produksinya kembali menurun perlahan sampai hanya mencapai produksi sekitar 40.000 ton pertahunnya.

Pada tahun-tahun berikutnya industri pengolahan rotan mulai dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah. Secara perlahan kemudian produksi rotan kembali meningkat kembali sampai dengan tahun 1994. Pada waktu itu banyak pabrik rotan yang ada di Eropa yang tidak produktif, karena banyak pabrik yang menurun produktifitasnya sebagai akibat dari kegagalan Eropah melakukan promosi, da pada saat yang tepat maka Indonesia menjadi alternatif produsen rotan<sup>1</sup>. Keadaan yang sangat mendukung pada waktu itu rupanya masih belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dimana kembali pasar dan tidak mampu meningkatkan daya serap untuk hasil rotan dari Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan dengan penurunan produksi rotan pada tahun 1998 yang hanya mencapai dibawah 40.000 ton pertahunnya. Selain itu masalah dalam negeri berupa kondisi perekonomian dan situasi politik yang kurang menguntungkan diduga ikut mempengaruhi.



Gambar 1. Produksi Rotan <sup>6)</sup>

<sup>1</sup> Keterangan dari Ir. Hartono, Pengurus Asmindo (1999)

Hasil survey yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan tahun 1986 di 15 propinsi di Indonesia menyimpulkan bahwa jatah tebang tahunan rotan adalah sekitar 696.000 ton seperti yang terlihat dari tabel 1 berikut dimana kapasitas produksinya yaitu sekitar 120.000 ton.

Wilayah	Produksi (ton/th)	%
Sumatera	106.900	15,3
Kalimantan	193.000	27,7
Sulawesi	361.000	51,8
Nusa Tenggara Barat	36.000	5,2
<b>Total</b>	<b>696.900</b>	<b>100</b>

Tabel 1. Potensi Tebang Lestari Rotan

Mengingat cukup tersedianya bahan baku rotan untuk kebutuhan industri, maka kapasitas terpasang industri pengolahan rotan seharusnya dapat menyesuaikan diri untuk menyerap bahan baku rotan yang tersedia. Berdasarkan data yang disajikan oleh pemerintah, industri rotan yang terdaftar dan tercatat pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun 1997 yaitu sejumlah 584 industri yang tersebar pada 24 propinsi. Berdasarkan produk yang dihasilkannya, industri pengolahan rotan dapat digolongkan kepada industri setengah jadi dan industri jadi. Industri pengolahan rotan setengah jadi menghasilkan produksi 619.637 ton pertahun, dan industri rotan jadi menghasilkan produksi sekitar 533.658 ton per tahun<sup>11)</sup>.

Namun demikian apabila disimak berdasarkan penyebaran industri pengolahan rotan, ternyata penyebarannya masih belum merata, dimana konsentrasi industri masih mendekati kepada pasar dibandingkan kepada sumber bahan baku. Sebagian besar lokasi industri menyebar secara tidak merata dan hanya terpusat di daerah Jawa Barat yaitu sebesar 30% dari total keberadaan seluruh industri rotan Indonesia. Dengan kata lain lebih dari setengah industri pengolahan rotan yang ada di Indonesia terdapat di pulau Jawa sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut.

No	Regional	Jumlah Industri	Kapasitas Prod. Barang ½ Jadi (ton/th)	Kapasitas Prod. Barang Jadi (ton/th)
1	Sumatra	50	43.906	34.049
2	Java + Bali	303	216.766	416.924
3	Kalimantan	87	94.011	54.217
4	Maluku	1	-	300
5	Sulawesi	135	260.735	28.168
6	Nusa Tenggara Barat	8	4.220	-

Tabel 2. Perkembangan Industri Rotan di Indonesia <sup>11)</sup>

Berdasarkan penyerapan tenaganya, maka industri pengolahan rotan dapat digolongkan dalam industri padat karya, dimana industri pengolahan ini pada umumnya tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan berteknologi tinggi. Karena industri pengolahan rotan ini adalah industri yang membutuhkan tenaga kerja yang besar, maka diperlukan ruang kerja yang cukup luas untuk menghasilkan produksi yang memadai.

Namun demikian, walaupun dibutuhkan ruang berusaha yang cukup luas tetapi pulau Jawa masih menjadi pilihan utama dari pemilihan tempat berusaha di bidang ini. Pada tabel 2 dapat dilihat keberadaan industri yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali dan terutama di daerah Jawa Barat. Di daerah Cirebon Jawa Barat, industri rotan yang masuk dalam kategori industri besar bahkan dapat mencapai 27 industri, industri menengah dan kecil mencapai jumlah yang lebih banyak yaitu sekitar 1,500 industri.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah rata-rata bahan mentah rotan yang dikonsumsi oleh industri pengolahan rotan ini dapat mencapai 32,000 ton, dimana dari jumlah tersebut ternyata hanya sekitar 0.1% bahan bakunya dari daerah setempat dan itupun hanya untuk pemakaian bagian-bagian yang yang tidak memerlukan kekuatan dan penampilan khusus. Dengan kata lain bagian terpenting lainnya masih sangat tergantung dari pasokan luar daerah.

Permasalahan kualitas pekerjaan merupakan kendala yang sering dihadapi di lapangan, para pembeli asing sering menolak hasil pekerjaan dari pengusaha industri rotan di luar Jawa. Ini juga salah satu yang mendorong terjadinya penjualan bahan mentah secara *illegal* yang sering terjadi terutama pada daerah perbatasan. Ketersediaan bahan baku di hulu yang tidak didukung oleh kemampuan pengolahan setempat ternyata akan mendorong industri di hilir untuk mengambil alih peran ini. Kondisi ini sebetulnya tidak cukup rasional mengingat pertimbangan biaya bahan baku dan biaya pengangkutan yang semakin besar dan perputaran *cashflownya* yang semakin lambat.

Adanya ketimpangan penyebaran industri pengolahan rotan yang terjadi diduga adalah sebagai akibat dari belum terciptanya kondisi yang kondusif. Kemampuan teknis daerah dan masih berorientasi untuk tujuan usaha jangka pendek merupakan penyebab dari belum mampunya daerah untuk merangsang tumbuhnya sentra-sentra industri baru.

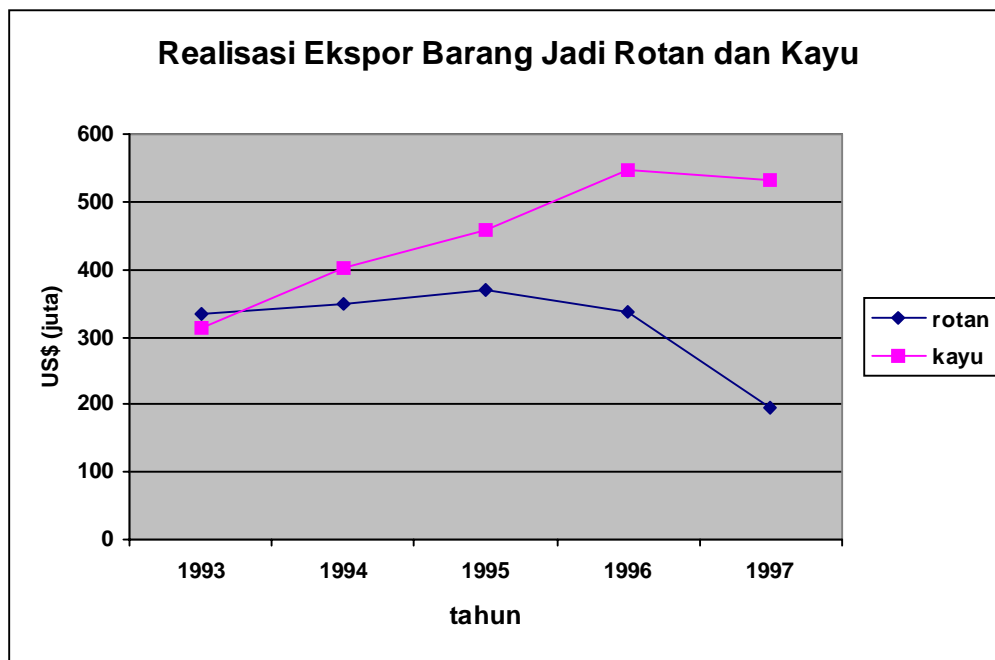
### **3.2. Penerimaan dari Rotan**

Dibandingkan dengan industri hasil hutan non-kayu lainnya, maka tingkat penerimaan rata-rata ekspor rotan pertahunnya selama kurun waktu tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 mencapai nilai US\$ 312 juta<sup>7)</sup> atau mencapai sekitar 80% dari keseluruhan ekspor hasil hutan bukan kayu (arang, kayu manis, kopal, getah resin, tengkawang, jelutung dan lain-lain hasil hutan ikutan<sup>6)</sup>). Penerimaan rotan dibandingkan dengan penerimaan non-kayu lainnya ternyata cukup menggembirakan. Apabila

dibandingkan dengan penerimaan dari ekspor kayu pertahunnya, ternyata penerimaan rotan juga memberikan nilai yang cukup besar yaitu sekitar 64%<sup>7)</sup> sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.

Tingkat penerimaan ekspor ini sebenarnya lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat penerimaan ekspor barang jadi rotan tahun 1986 yang hanya mencapai US\$ 20 juta. Nilai ini sebetulnya sudah cukup baik apabila dibandingkan penerimaan yang diterima dari sejak tahun 1986 saat diberlakukannya larangan ekspor rotan asalan dan setengah jadi sampai dengan tahun 1991. Pada saat itu perdagangan produk rotan dari Indonesia pernah menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar barang jadi rotan. Penerimaan barang jadi rotan terutama mebel menurut catatan pemerintah bahkan terus meningkat mencapai US\$ 306 juta atau 83% dari nilai ekspor barang jadi rotan pada tahun 1995.

Peningkatan penerimaan tersebut ternyata masih belum diikuti dengan peningkatan kualitas produk. Hal itu dapat terlihat dari penurunan tingkat harga produk rotan jadi dari sekitar US\$ 4563/ton menjadi hanya sekitar US\$ 2000-3200/ton di tahun 1997<sup>7&8)</sup>. Selain itu umumnya masih mengandalkan ekspor *furniture* sementara nilai ekspor jenis-jenis lainnya seperti lampit dan plating menurun.



Gambar 2, Sumber Data : BPS  
Diolah dan ditabulasi oleh Asmino<sup>4)</sup>

Selain karena kemampuan petani dalam melakukan pemilihan kualitas bahan baku, maka industri pengolahan rotan selama ini juga ikut menentukan harga ditingkat petani. Harga rotan ditingkat petani pernah mencapai tingkat terendah yaitu hanya Rp.250 perkg yang terjadi tahun 1997 untuk jenis rotan irit dan sega basah. Pada waktu itu harga yang jauh menurun itu terutama disebabkan ketidakmampuan industri dalam negeri menyerap bahan baku rotan<sup>8)</sup>.

Masih belum dimanfaatkannya rotan dari tanaman terutama disebabkan oleh daya serap pasar yang tidak mendukung misalnya rotan tanaman yang belum dipanen di Kalimantan Timur dan Jawa.

## 4. Peran Pemerintah dalam Pengusahaan Rotan

Beberapa pendapat yang pernah disampaikan oleh beberapa pihak untuk menghasilkan produksi rotan berkualitas yang dapat diserap pasar antara lain yaitu dengan menghasilkan kemampuan pasar untuk menyerap produksi dan dengan memperhatikan kelangsungan produksi. Terjadinya persaingan yang tidak sehat di dalam negeri sering juga mengakibatkan terjadinya usaha untuk saling mematikan sesama industri di dalam negeri<sup>8)</sup>. Dan yang juga tidak kalah pentingnya yaitu usaha meningkatkan promosi dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk rotan Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam dan pengaturan hasil pengolahan produksi rotan selama ini ditangani oleh dua departemen teknis yaitu departemen yang mengatur pengelolaan sumber daya yaitu Departemen Kehutanan dan Perkebunan serta departemen yang menangani industri dan perdagangan dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dengan dilakukannya pemisahan pengurusan sumber daya alam dengan pengolahan/pemasarannya menunjukkan bahwa perhatian pemerintah masih secara sektoral dengan koordinasi yang belum maksimal. Campur tangan pemerintah terlihat masih dominan terutama dengan yang terkait dengan industri dan pemasaran. Ini dapat dilihat antara lain dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan pemerintah mengenai tataniaga rotan. Namun demikian ketentuan tersebut umumnya masih merupakan respon dari kebijaksanaan jangka pendek untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan seberapa jauh kebijakan pemerintah telah menunjukkan keberhasilannya ternyata masih belum dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Pemerintah melalui instansi yang terkait di dalamnya seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Kehutanan dan Perkebunan merasa perlu untuk menetapkan kebijakan. Keputusan yang cukup penting, yaitu dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur pelarangan ekspor bahan mentah rotan pada tahun 1979. Yang menjadi tujuan dikeluarkannya ketentuan tersebut pada waktu itu yaitu untuk memperoleh nilai tambah (*added value*) produk rotan menjadi barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah. Dan yang selama ini menjadi perhatian pelaku utama bisnis rotan yang telah mapan yaitu bagaimana menghasilkan produksi hasil industri rotan yang berkelanjutan (*sustainable production*), dan ini merupakan konsekuensi turut memperhatikan lingkungan (*sustainable management*) untuk keberlangsungan usaha. Yang kemudian menjadi pertanyaan yaitu apakah dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut akan meningkatkan perdagangan rotan setengah jadi dan rotan jadi untuk pemasaran luar negeri?

Dengan ketentuan tersebut pemerintah berharap akan dapat mengarahkan rotan sebagai komoditi unggulan seperti halnya kayu. Ketentuan larangan ekspor hasil rotan setengah jadi pada tahun 1986 selanjutnya juga mengarahkan harapan untuk meningkatkan penerimaan ekspor. Dengan demikian, pemerintah mengarahkan industri yang tadinya padat karya sekaligus sekaligus menjadi industri yang



padat modal. Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut maka beramai-ramai pengusaha mulai menanamkan investasinya besar-besaran tahun 1987 hingga 1989 untuk industri pengolahan rotan.

Permasalahan yang kemudian muncul kepermukaan dan sering disampaikan dalam berbagai kesempatan pertemuan oleh kalangan pengusaha rotan yang tergabung dalam Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (Asmindo) dan juga disampaikan oleh pihak pemerintah yaitu menyangkut masalah lapangan kerja, dana dan kurang meratanya pertumbuhan industri. Salah satu usulan pemecahan yang pernah disampaikan oleh pelaku bisnis rotan ini yaitu melalui pelibatan banyak pihak seperti Dephutbun, Deperindag, Depnaker, Koperasi dan Asosiasi industri permebelan dan kerajinan Indonesia untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama<sup>8)</sup>. Namun demikian, hasil yang didapatkan sampai sekarang masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

## **5. Kebijakan Pemerintah mengenai Tataniaga Rotan**

Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa kelangsungan produksi industri rotan akan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya rotan. Beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa kekayaan sumber daya rotan Indonesia dapat memberikan kontribusi 80% dari produksi rotan dunia. Dan ini merupakan modal yang sangat penting untuk mendukung keberadaan industri pengolahan rotan yang ada.

Walaupun demikian, tidak adanya jaminan terhadap ketersediaan bahan mentah rotan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri sering sekali muncul. Hal tersebut bisa karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat harga dan juga disebabkan karena situasi perekonomian yang tidak mendukung<sup>7)</sup>. Untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku, seringkali rotan harus didatangkan dari daerah yang cukup jauh. Kondisi seperti itu sering membawa akibat yang tidak menyenangkan baik itu terhadap petani pengumpul, pedagang antar daerah dan juga terhadap industri pengolahan rotan. Penyebab lain yang ikut berpengaruh diakibatkan karena sistem distribusi dan aturan yang terkait belum mampu mendukung pengembangan industri rotan untuk jangka panjang. Artinya penanganan perdagangan bahan baku yang dilakukan selama ini masih berdasarkan kepada perdagangan yang tradisional dan belum menyertakan perencanaan bisnis jangka panjang pada semua lini terkait.

Terjadinya transaksi dagang di daerah perbatasan yang memukul kelangsungan usaha industri pengolahan rotan di Pulau Jawa seperti dengan sering terjadinya penyelundupan rotan adalah suatu fakta bahwa ternyata kebijakan pemerintah masih belum mendukung iklim berusaha untuk banyak pihak. Perdagangan rotan masih dipandang sebagai kegiatan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek. Apabila situasi pasar kurang menguntungkan maka kegiatan perdagangan sering sekali ditinggalkan, dan pelaku bisnis rotan lalu pindah ke bisnis lain.

Kesulitan tersebut juga terjadi di kawasan industri pengolahan rotan di daerah Cirebon (Jawa Barat) terutama yang menyangkut pengadaan bahan baku. Selain keadaan pasar yang kurang menguntungkan tersebut, pihak industri pengolahan rotan selama ini masih menggantungkan diri pada kelangsungan pengadaan bahan baku. Bahan baku yang disediakan oleh petani, pengumpul dan pedagang rotan di daerah umumnya masih belum terseleksi. Bahan mentah rotan biasanya masih belum dikelompokkan kedalam pengelompokan kualitas sesuai dengan kriteria kebutuhan industri. Petani dan pengumpul masih belum memikirkan masalah kualitas. Pola berusaha jangka pendek menjadi pandangan yang biasa. Kemampuan pengolahan yang masih minim oleh petani atau pedagang rotan mentah masih belum mampu mengantar untuk terjalinnya kerjasama antara petani, pedagang dan industri pengolahan rotan.

Sebagai akibat dari keberadaan industri yang tidak merata dan terpusat di Jawa, maka pada masa krisis ekonomi tahun 1998 harga bahan mentah rotan melambung sangat tinggi. Selain karena harga bahan baku yang melambung, kesulitan lain juga karena pengadaan bahan yang harus didatangkan dari daerah yang jauh di Kalimantan Timur atau dari Sulawesi ikut menambah rantai distribusi yang semakin panjang.

Kebijaksanaan pemerintah dengan pemberlakuan pajak ekspor tinggi untuk rotan mentah dan rotan setengah jadi terutama akan mendukung industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi serta yang memiliki modal dan mempunyai pengalaman ekspor yang mendukung. Apabila tidak mempunyai dukungan pengalaman dan modal yang cukup tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik karena kualitas produksi yang masih rendah yang mempengaruhi citra hasil rotan secara menyeluruh.

Penghapusan berbagai ketentuan distribusi pada beberapa lini produksi sampai pemasaran merupakan kebijakan yang diharapkan oleh pelaku pasar. Untuk meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah menyetujui perubahan kebijaksanaan yang dikaitkan dengan kesepakatan *International Monetary Fund* (IMF) yang mengatur pungutan ekspor barang jadi rotan. Sesuai dengan kesepakatan IMF, maka pajak ekspor secara bertahap diprogramkan untuk diturunkan. Kesepakatan itu oleh banyak pihak dipandang masih belum cukup mempertimbangkan bagaimana sebenarnya pemasaran dilakukan di level bawah masyarakat dan pengusaha lokal seperti pasar-pasar tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Selain itu kebijakan yang ditetapkan masih lebih banyak menyangkut kebijakan perdagangan dibandingkan membahas pemikiran yang berkaitan dengan produksi bahan baku rotan.

Penerapan beberapa pungutan di lapangan, ternyata masih memberikan perbedaan perlakuan terhadap rotan alam dan rotan budidaya. Para petani masih merasa bahwa pemberlakuan pungutan ini sebagai beban tambahan yang harus dipikul. Masalah ini juga berdampak untuk berkurangnya pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh para petani dan pedagang. Masalah tersebut juga dirasakan oleh Asosiasi Mebel kayu dan Rotan Indonesia (Asmindo).

Khusus menyangkut pembinaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, untuk daerah di luar Jawa masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Sentra industri pengolahan rotan di Jawa masih ditempatkan sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan pembinaan pemerintah. Tugas dan wewenang pemerintah pusat yang masih dominan dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara pusat dan daerah. Perbedaan kualitas sumber daya manusia di Jawa dan luar Jawa juga mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

## 6. Penutup

Distribusi bahan mentah rotan dari Sumatera, Kalimantan dan beberapa pulau lainnya di luar Jawa ke Jawa masih banyak dilakukan secara tradisional. Selain itu ada juga yang sudah lebih maju misalnya dengan membuka perwakilan-perwakilan di Pulau Jawa. Pedagang antar pulau di Kalimantan Timur misalnya mengumpulkan rotan dari pedagang di pedalaman, selanjutnya dikirim ke perwakilannya di Cirebon atau Surabaya.

Penyebaran industri pengolahan rotan yang tidak merata sering memacu terjadinya pemusatan atau terbentuknya sentra-sentra industri di beberapa tempat yang dapat mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Undang-undang mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah yang tertuang dalam UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 akan dipertaruhkan apakah mampu memberikan pengaruh kepada munculnya sentra-sentra baru di daerah pada masa yang akan datang dengan harapan daerah tersebut akan mempunyai peluang untuk berkembang. Dan ini masih menjadi pertanyaan seberapa besar pemerintah pusat nantinya berpengaruh kepada penetapan kebijakan daerah.

Kesepakatan antara IMF dengan Pemerintah Indonesia, sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi telah mendorong pemerintah meninjau kembali segala bentuk subsidi yang pernah diberlakukan terhadap produk kehutanan termasuk rotan. Kesepakatan tersebut diharapkan akan memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua lapisan yang berkecimpung dalam pengelolaan rotan untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan termasuk rotan untuk kepentingan peningkatan pendapatan.

Pengadaan bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan rotan kiranya perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik oleh pemerintah dan pelaku bisnis. Pemerintah dengan wewenangnya telah mengeluarkan ketentuan pemasaran yaitu dengan melakukan penyempurnaan sistem distribusi, antara lain melalui paket diregulasi 21 Januari 1998, dimana pemerintah memandang perlu untuk mengurangi campur tangan dalam perdagangan rotan dengan harapan dapat menghilangkan hambatan birokrasi.

Selama ini pelaku bisnis rotan mulai dari tingkat petani, pengumpul rotan, pedagang kecil dan pedagang antara tingkat penerimaannya sering dipengaruhi oleh gejolak pasar tanpa bisa berbuat banyak. Pada umumnya kelompok ini masih belum berani untuk mengandalkan usahanya hanya dari rotan saja. Selain disebabkan karena tingkat harga yang sering tidak menentu juga karena adanya pungutan-pungutan yang cukup memberatkan. Penerapan berbagai ketentuan pungutan seperti Iuran Hasil Hutan (IHH) yang sekarang diganti PSDH oleh para pedagang di daerah sering dianggap tidak memihak mereka, ditambah lagi dengan biaya lain-lain yang harus dikeluarkan yang semua ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan turunnya daya saing.

Tingginya pajak ekspor terutama sebelum diberlakukannya kesepakatan IMF juga menjadi penyebab tidak mampunya eksportir melakukan persaingan di pasar internasional. Negara pesaing sebenarnya ada yang memperoleh bahan baku rotan dari Indonesia, namun dengan berhasil memperoleh nilai tambah. Adanya penyelundupan juga merupakan suatu indikasi dari masih belum berhasilnya pemerintah melakukan pembinaan. Kesulitan untuk mengekspor bahan mentah juga menyebabkan nilai jual rotan dalam negeri menjadi rendah.

Beberapa forum diskusi mengenai rotan juga merekomendasikan perlunya mengkaji berbagai kesulitan yang ada di lapangan, terutama sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan pemerintah yang mengatur kebijakan ekspor rotan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 187/MPP/Kep-4/98.

Hal lain yang perlu juga mendapatkan perhatian yaitu kualitas, desain dan juga promosi untuk pemasaran di mana tingginya persaingan perdagangan furniture rotan di pasaran Internasional maka minat berusaha jangka panjang oleh pelaku bisnis rotan pada berbagai tingkat perlu untuk terus ditumbuhkan.

## Pustaka

1. Alrasyid, H. 1987. Aspek-aspek Silvikultur Rotan. Diskusi Hutan Tanaman Industri (27-28 April 1987). Jakarta.
2. Anonim. 1998. Lokakarya mengenai rotan. Hotel Mesra Internasional Kalimantan Timur 15- 16 Desember 1998. Kalimantan Timur.
3. Asmino. 1998. Rattan Furniture Export.
4. Asmino. 1999. Realisasi Ekspor Barang Jadi Rotan dan Kayu, Diolah dan ditabulasikan dari BPS.
5. Data di sarikan dari Harian Republika “Ekspor Rotan diperlonggar, Perajin Terancam” tanggal 10 Juli 1999.
6. Directorate General of Forest Utilization, Ministry of Forestry and Estate Crops. 1998. 1997/1998 Forest Utilization Statistical Yearbook. Jakarta.
7. Djumarman. 1998. Pengembangan Industri Pengolahan Rotan sebagai salah satu Sumber Devisa (Disampaikan pada workshop tentang Deregulasi Rotan tanggal 14 April 1998). Jakarta.
8. Hartono. 1998. Prospek Industri Rotan dan Saran Penanganan yang diperlukan. Jakarta .
9. Hartono. 1998. Prospek Pasar Produk Industri Pengolahan Rotan. Jakarta.
10. Haury, D. and B. Saragih. 1996. Pengolahan dan Pemasaran Rotan. SFMP Documen No.6b. 1996. Ministry of Forestry in Cooperation with Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
11. Nadapdap, W. 1998. Pentingnya Rotan sebagai hasil hutan bukan kayu. Paper seminar“Development of Rattan in East-Kalimantan.
12. Perum Perhutani. 1986. Pengembangan Tanaman Rotan di Pulau Jawa. Makalah Lokakarya Nasional Rotan 15-16 Desember 1986. Jakarta.
13. Sutarno, H. et. all. 1974. Rotan: Pembudidayaan dan Prospek Pengembangannya. Seri Pengembangan PROSEA 6.1. Bogor.